

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekuatan Politik

Kekuatan berasal dari kata banyak tenaga, daya, keras, usaha, dan unggul. Kemudian kekuatan diartikan sebagai kesatuan yang diinginkan, meskipun kekuatan dan kekuasaan seringkali memiliki pengertian yang sama, akan tetapi sebagian besar beranggapan kekuasaan sebagai konsep yang lebih besar dan kekuatan sebagai bentuk dari suatu kekuasaan yang lebih dalam dalam berbagai aspek. Politik diartikan sebagai siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana cara membagi nilai yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang, pengaruh, tindakan yang ditujukan untuk mempertahankan atau memperluas. Dari seluruh sudut pandang yang banyak, ada suatu kesimpulan bahwa politik memiliki ruang lingkup yang dilaksanakan individu politik adalah kegiatan (Mufti, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas maka politik secara fundamental merupakan seni dan ilmu memerintah. Politik juga merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam satu sistem politik atau negara yang berhubungan dengan cara penentuan tujuan dari sistem tersebut, disatu sisi politik sebagai cara mewujudkannya. Sehingga politik dapat disebutkan sebagai kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu yang bersifat politis (Mufti, 2013).

Tindakan politis memiliki ruang lingkup proses, dimana kelompok individu menggunakan kekuatan atas individu lain untuk berusaha agar kepentingannya tercapai. Selain itu politik juga merupakan usaha untuk menaikan penguasa untuk membentuk sebuah kebijaksanaan negara dalam suatu pemerintah. Stratifikasi kesatuan politik yang dapat dituju oleh suatu kelompok masyarakat pada dasarnya menunjukan hubungan antara lembaga politik dan kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang berupa etnis, agama, dan lain sebagainya. Kekuatan politik merupakan penjelasan mengenai individu atau kelembagaan. Menurut individu, kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik atau individu yang memainkan peran dalam suatu kehidupan politik untuk mempengaruhi dalam proses keputusan politik. Secara kelembagaan, kekuatan politik merupakan lembaga atau organisasi ataupun bentuk dari tujuan untuk mempengaruhi proses keputusan politik. Adapun fungsi dari kekuatan politik yakni:

1. Kontribusi untuk mempengaruhi kebijakan (proses pembuatan dan implementasi kebijakan);
2. Stabilitas kekuatan;
3. Mengumpulkan dengan masif mengenai kepentingan.

Dalam kekuatan politik, terbagi menjadi dua, yakni kekuatan politik formal yang pada dasarnya diambil dalam bentuk partai dan militer. Kekuatan politik non formal yang merupakan bagian dari masyarakat sosial, seperti kelompok gerakan, kelompok organisasi dan lain sebagainya. Sehingga dapat diperjelas bahwasannya kekuatan politik itu hadir dalam kegiatan-kegiatan politik yang secara dasar

mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi satu sama lain dalam hal kepentingan yang bersifat politik (Mufti, 2013).

Salah satu kekuatan politik di negara demokrasi yakni partai politik. Partai politik merupakan sekumpulan yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakteristik kebijakan publik dalam tujuan prinsip dan ideologis kepentingan. Dengan mencapai tujuan tersebut maka adanya praktik kekuasaan secara langsung melalui kegiatan aktif partisipasi masyarakat dalam suatu pemilihan. Sehingga kekuasaan yang ada pada partai politik merupakan sumber kekuatan partai politik itu dapat menyetir suatu pemerintahan secara praktik langsung dengan akad dan cara yang dapat digunakan. Disamping itu, keberadaan pemilih sebagai alat untuk mempengaruhi kekuatan politik. Suara sumbangan menjadi faktor pendorong terselenggara kebijakan berkuasa. Akan tetapi sumber kekuatan politik bukan hanya terletak pada jumlah suara saja, akan tetapi masih ada seperti kekayaan seorang politikus untuk mendukung partai politik berkuasa. Sehingga menjadi pendukung kader yang berkualitas, karena secara langsung akan berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat (Mufti, 2013).

Dalam konsep partai politik, sebagai bentuk organisasi artikulatif yakni para pelaku politik yang berpartisipasi dalam masyarakat yakni menitik beratkan untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan mencari suara. Sehingga partai politik memiliki peran yang besar untuk menghubungkan antar kekuatan dan pemikiran dengan pemerintahan formal dan mengikat dengan suatu kegiatan politik dalam suatu masyarakat, karena demokrasi justru menjadi representatif bukan dari negara, tetapi partai politik (Mufti, 2013).

2.1.1 Kekuatan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif

Partai politik memiliki fungsi untuk komunikasi politik yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Menjembatani suara rakyat yang harus ditampung untuk diaspirasikan pemerintah. Selain itu disatu sisi sosialisasi politik untuk mencari pandangan kepentingan dan nilai dari semua golongan. Dalam proses pemilihan dengan sistem apapun, partai politik akan menjadi mesin untuk menciptakan rekrutmen kaderisasi untuk mengisi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bukan hanya itu saja, rekrutmen partai politik menjadi jaminan untuk menjadi fungsi untuk mencetak pemimpin bangsa dan negara. Selain itu membawa pemikiran partai politik yang menjadi latar belakang seperti visi dan misi partai politik, dengan menawarkan kualitas individu dan program yang ditawarkan. Oleh karena itu, partai politiklah yang memilih dan menyusunn pada pemilihan umum dan mengstukuralkan sebuah pemerintahan (Mufti, 2013).

Jenis dan sistem suatu partai secara umum terbagi menjadi dua, yakni partai masa yang mengutamakan kekuatan karena memiliki jumlah anggota yang berasal dari beragam aliran politik dan kelompok. Partai kader lebih menitik beratkan pada kapasitas organisasi dan kepatuhan kader-kadernya. Adapun jenis partai menurut penjelas lainnya terbagi menjadi (Mufti, 2013; Kambo, 2012)

1. Partai kader yang terbentuk karena masyarakat kelas menengah atas memiliki hak pilih. Ciri khusus dan donatur, organisasi, dan ideologi masih dibawah. Kader yang berasal dari menengah atas, ideologi konservatif keras, organisasi kecil, dan condong pada pembentukan kelompok informal.

2. Partai masa terbentuk karena adanya perluasan terhadap hak pilih masyarakat yang berada di luar parlemen. Cirinya memiliki tujuan untuk masa atau pendukung yang besar seperti buruh, petani, dan lain sebagainya. Prospek kedepannya menginginkan ada Pendidikan politik bagi para kadernya dan bukan hanya mencari suara saja.
3. Partai diktatorial terbentuk karena adanya partai massa dengan pemikiran keras dan kaku. Kapasitas pemimpin berasal dari partai yang memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap pengurus dan anggotanya. Berbeda dengan partai massa, dictatorial lebih pilih-pilih untuk mencari para anggota yang militansinya tinggi.
4. Partai *catch-all* terbentuk karena adanya gabungan partai kader dan massa. Orientasinya untuk memberikan cahaya pada kegiatan pemilu dengan memberikan program dan keuntungan bagi kadernya.

Kekuatan Parpol dalam sebuah kontestasi memiliki beberapa dimensi diantaranya, kekuatan Internal Parpol merupakan kekuatan yang bersumber dari kekuatan partai itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Parpol lain. Kekuatan tersebut terbagi menjadi:

1. Kapabilitas Finansial, ketersediaan sumber daya yang cukup dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan politik, kampanye dan operasional dalam Pemilu, adanya sumber daya menjadi bentuk kekuatan sebuah partai.
2. Struktur Organisasi, kekuatan Parpol terletak pada kapasitas organisasi untuk melaksanakan fungsinya, baik di pusat maupun daerah, organisasi

dalam Parpol harus memiliki aturan dalam mengambil setiap aktivitas partai, penggunaan sumber daya, strategi politik, dan hal yang menyangkut kegiatan politik Parpol;

3. Pengaruh Ideologi, ideologi menjadi hal dasar landasan Parpol untuk membentuk loyalitas jangka panjang dari pada konstituennya, karena pada dasarnya ideologi merupakan karakteristik yang nyata bagi Parpol sehingga dengan adanya ideologi dapat memberikan suatu alasan untuk konstituen memilih;
4. Akses terhadap kekuasaan, Parpol yang memiliki positioning dalam kekuasaan baik legislatif dan eksekutif nantinya akan mempengaruhi terhadap keputusan kebijakan negara;

Kekuatan eksternal Parpol merupakan kekuatan yang dibutuhkan dalam mempertahankan kekuasaan, hal tersebut tentu menjadi realitas bahwa kekuatan eksternal dibutuhkan untuk memberikan dukungan untuk Parpol tersebut, kekuatan itu terdiri dari:

1. Dukungan Massa dan kelompok kepentingan, kekuatan Parpol sangat bergantung pada kondisi dan jumlah dukungan yang terstruktur dalam jaringan kader, simpatisan, dan konstituen;
2. Koalisi Parpol yang lain, dalam mencapai suatu tujuan politik tentunya Parpol akan membentuk koalisi untuk membentuk kekuatan yang sangat kuat dalam suatu kontestasi. Karena dengan berkoalisi nantinya akan memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial-politik dalam suatu masyarakat.

2.2. Modalitas Dalam Pemilihan

Dalam sebuah kontestasi pemilihan, proses demokrasi secara dasar memiliki cara-cara dan urgensi dengan memilih pemimpin dan penentuannya didasarkan atas perolehan suara terbanyak. Kontribusi masyarakat dengan memilih pemimpin tersebut diberi kebebasan untuk memilih dan politisi bebas membentuk organisasi, lembaga, dan kelompok yang menjadi wadah aspirasi masyarakat. Secara empiris kondisi tersebut dipengaruhi dimana pemimpin memiliki peluang besar apabila memiliki modal untuk kontestasi yang berbeda-beda (Pantouw, 2012).

Dalam paradigma Teori modal mempunyai ikatan yang erat dengan persoalan kekuasaan dan kekuatan. Modal menjadi suatu konsentrasi kekuatan spesifik yang terjadi pada di dalam ranah yang tengah mengalami pertarungan. Hal tersebut dikarenakan setiap ranah akan menunjuk untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat berkuasa secara baik dan bertahan di dalamnya (Bourdieu, 1986; Harker, 2009).

Situasi sumber daya modal yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan dominasi suatu keadaan sosial. Modal merupakan rekapitulasi kerja yang dapat berupa hal-hal materiil yang memiliki nilai simbolik dan signifikansi secara kultural dengan dialokasikan secara privat untuk memperoleh kekuatan sosial. Kekuasaan dan kekuatan sosial di dalam ranah yang mengalami pertarungan dapat dihasilkan oleh energi sosial dari modal (Bourdieu, 1986; Harker, 2009).

Adapun kategorisasi dari modal yang disebutkan searah dengan pemikiran Bourdieu diantaranya (Halim, 2018; Krisdinanto, 2014; Krisdinanto, 2022; Fathy, 2019; Putra dkk, 2022; Sumarno dkk, 2013) :

1. Modal Sosial. Modal sosial merupakan semua jenis hubungan sebagai sumber daya penentuan dari kedudukan sosial. Pada hakikatnya modal sosial merupakan hubungan sosial yang memiliki nilai antar individu. Hal ini dapat dicontohkan dengan separuh masyarakat yang melakukan interaksi antar kelas dalam lapisan sosial di masyarakat. Untuk menghindari pembiasan makna, maka modal sosial memiliki kecenderungan fokus yang terletak pada tiga pokok penting. *Pertama*, modal sosial yang menyangkut norma, institusi, konsep hidup, norma, dan yang lainnya. *Kedua*, model penyelenggaraan modal sosial yang menjadi bagian analisa yaitu memiliki nilai produktif bagi terwujudnya kepaduan sosial. (*social cohesiveness*). *Ketiga*, pendefinisian modal sosial hanya berkonteks interaksi dengan dunia luar yang sewajarnya harus terlibat proses adaptasi dan negosiasi. Selanjutnya menggiring individu lain untuk melaksanakan tindakan interpretatif terhadap modal sosial yang dimiliki. Modal sosial dapat diukur dengan tiga cara. Pengukuran pertama, dukungan kelompok calon dapat diukur melalui jumlah dukungan kandidat lain. Adapun pengukuran ini dapat melibatkan dukungan dari individu dengan alasan bila dukungan individu mempunyai pengaruh kepada dukungan kolektif. Pengukuran kedua dapat memberikan informasi antara ikatan pribadi dari calon kelompok di luar partai politik dengan partisipasi dari kandidat. Adapun kelompok di luar partai politik dapat berupa kelompok sipil lokasi, asosiasi profesional, klub, dan kelompok lainnya. Pengukuran ketiga adalah

pengakuan nama yang menunjukkan seberapa dikenal kandidat dalam asosiasinya.

2. Modal Kultural. Modal kultural merupakan seluruh kualifikasi intelektual yang dapat dibuat dengan pendidikan formal dan warisan keluarga, seperti kepemilikan benda budaya bernilai tinggi, kapasitas menampilkan diri di depan publik, dan keahlian atau pengetahuan tertentu dari hasil pendidikan formal. Contoh lain dari modal kultural merupakan kemampuan menulis, cara bergaul, dan cara pembawaan yang memiliki peran di dalam penentuan kedudukan sosial. Hal tersebut menjadikan modal sebagai representasi dari kemampuan intelektual yang memiliki hubungan dengan aspek etika, logika, dan estetika. Pada dasarnya, modal kultural dapat berupa keyakinan akan nilai-nilai tentang semua hal yang dipandang benar dan bisa diikuti dengan cara untuk mengimplementasikannya. Modal kultural tidak terimplementasikan dengan sendirinya dalam realita dengan memiliki manfaat untuk individu yang meyakini atau masyarakat pada umumnya. Melainkan dapat berhenti sebagai suatu hal yang tidak memberikan manfaat apapun. Komitmen tinggi dan kemampuan dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk melestarikan, memelihara, memanfaatkan, dan memperbaharui modal kultural .
3. Modal Ekonomi. Modal ekonomi merupakan sumber daya yang menjadi sarana finansial dan sarana produksi. Pada dasarnya, modal ekonomi menjadi jenis modal yang mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk modal lainnya. Adapun cakupan dari modal ekonomi dapat berupa alat-alat

produksi, uang, dan materi yang menjadikan modal ini gampang digunakan untuk semua tujuan dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kategorisasi modal ekonomi yang lebih nampak ialah masalah uang. Selanjutnya modal uang tersebut digunakan untuk membiayai kampanye bagi individu maupun partai politik yang berusaha untuk mendapatkan perhatian publik. Sarana dari kampanye dapat menggunakan media promosi seperti TV, koran, baliho, spanduk, dan media promosi lainnya yang membutuhkan dana besar.

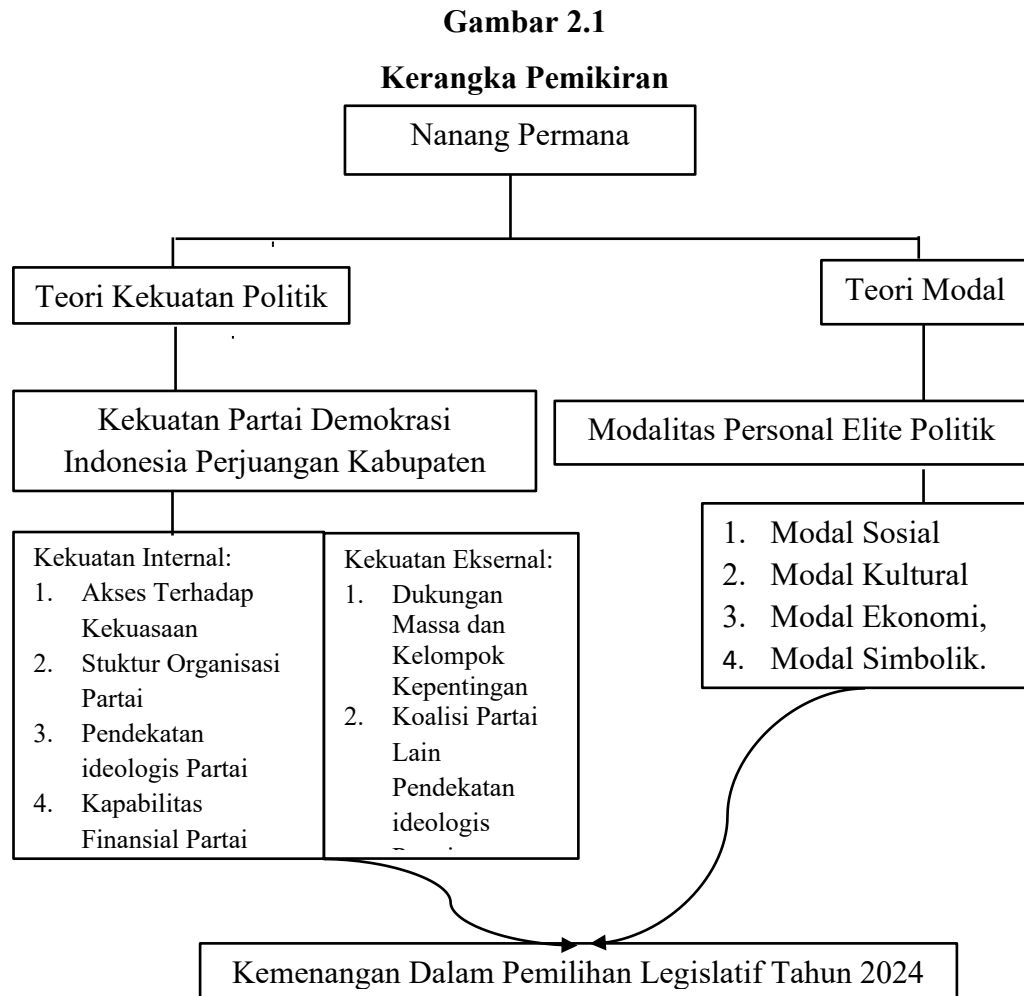
4. Modal Simbolik. Modal simbolik merupakan jenis sumber daya yang dimaksimalkan untuk meraih kekuasaan simbolik. Simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, gelar, status tinggi, pretise, dan keluarga ternama seringkali dibutuhkan dalam kekuasaan simbolik. Dengan arti lain, modal simbolik dapat didefinisikan sebagai semua bentuk pengakuan individu atau kelompok secara institusional dan non institusional. Simbol kekuasaan mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksi realitas yang selanjutnya memiliki kapasitas untuk menggiring orang untuk mengakui, mempercayai, dan mengubah pandangan tentang realitas individu, kelompok, partai politik, atau sebuah bangsa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dinamika negara demokrasi yang menghubungkan antara masyarakat dalam mengatur negara dengan diwakilkan oleh pemerintah melalui pemilihan legislatif. Legislatif membentuk suatu pemerintahan antara pemilih dan yang dipilih melalui pemilu. Tentunya dalam politik legislatif selain berbicara kinerja berbicara

mengenai langkah-langkah untuk bisa mendapatkan suara dari konstituennya untuk bisa memperoleh kursi legislatif. Nanang Permana merupakan politisi yang menduduki kursi legislatif DPRD Kabupaten Ciamis pada periode 2024-2029.

Nanang merupakan elite yang sangat kuat, karena pengaruh PDIP di Kabupaten Ciamis yang menjadi salah satu Parpol yang kuat dalam Pileg. Elite politik dengan Parpol memang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Parpol bisa menjadi instrumen dalam kekuatan politik. Selain itu pada dasarnya kondisi elite juga mempengaruhi dalam setiap kontestasi untuk bisa menjadi pemenang. Maka dari itu dinamika pada Pileg 2024 di Kabupaten Ciamis, dimana Nanang memiliki kekuatan politik dari Parpol yang mengusung dia dan modali dia dalam menggunakan sumber daya dalam kemenangan Pileg 2024 di Kabupaten Ciamis. Menggunakan teori kekuatan politik, akan tetapi fokus utama dalam pembahasan mengenai PDIP nya karena secara dasar Nanang merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Ciamis. Artinya ada akses dalam mengatur partai untuk bisa membantu dalam kemenangan, terlepas dari tanggung jawab dia sebagai Ketua DPC. Point-point sebagai analisis peneliti diantaranya kekuatan internal, akses terhadap kekuasaan, struktur organisasi partai, pendekatan ideologis partai, dan kapabilitas finansial partai. Selain itu menggunakan teori modalitas politik yang terbagi menjadi beberapa point diantaranya modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik.



Sumber data: data olahan penulis